

**PELAKSANAAN PROGRAM USAHA EKONOMI KELURAHAN
SIMPAN PINJAM (UEK-SP) DI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

Oleh :

Omi Arlisa

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli, SD, M.si

Omiarlisa90@gmail.com

081275588237

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Publik-Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The real shape of this program is to serve the small business community who wants to get a loan from the Village Office in the city of Pekanbaru. One of them in Business Economy Village Savings and Loans (UEK-SP) Sidomulyo which is an alternative non-bank financial institutions that can give attention to the poor or the weak economy that wants capital relief effort. The phenomena that occur are the absence of awareness of customers / users and the low quality of human resources. The purpose of this study is to see how the implementation of the Economic Business Programs Village Savings and Loans (UEK-SP) in the Village of West Sidomulyo Pekanbaru City Subdistrict Handsome and determine the factors that influence the implementation of the Economic Business Programs village Savings and Loans (UEK-SP) in the Village Sidomulyo Handsome Western District of the city of Pekanbaru. Nakamura and Smallwood (in Sujianto 2008: 152) argues that there are three dominant way to determine the success of the program that can be seen from compliance, routine procedures and the achievement of program objectives. This research is a qualitative descriptive study, which the authors describe how the implementation of the program Economic Business Village Savings and Loans (UEK-SP) in the Village of West Sidomulyo the District Charming Pekanbaru City by taking the research location that UEK-SP Sidomulyo. Data collection techniques are interviews and the key informant is Chairman UEK-SP Sidomulyo. This study uses snowball sampling to determine informants to be interviewed. Results of this study concluded that the program of economic Esaha Village Savings and Loans (UEK-SP) in the Village of West Sidomulyo Handsome District of the city of Pekanbaru by looking at the indicators that I use, namely compliance, routine procedures and the achievement of the objectives of the program "Less Good". In this study, also known factors that affect the implementation of the Economic Business Programs Village Savings and Loans (UEK-SP) in the village of West Sidomulyo Kecamatan Handsome Pekanbaru namely: Low Human Resources, lack of experience and lack of public awareness.

Keywords: Implementation of the program, compliance, routine procedures and the achievement of program objectives.

Pendahuluan

Penanggulangan kemiskinan yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Program Pemberdayaan Kelurahan merupakan salah satu wujud nyata dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau. Keseriusan pemerintah ini tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tentang pedoman alokasi dana sharing dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa/kelurahan tanggal 22 Maret 2005. Salah satu aspek dalam Program Pemberdayaan Desa yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Gubernur melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Riau dan Walikota Pekanbaru melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Pekanbaru adalah Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang di laksanakan dan dikelola oleh dan untuk masyarakat sebagai dana abadi desa/kelurahan.

Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) adalah suatu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah sesuai agenda utama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas), serta dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004 tentang pembentukan Komite

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau.

Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) adalah program pembangunan yang serasi dengan muatan pemberdayaan masyarakat, di mana pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan sejumlah dana untuk masyarakat kelurahan (disebut Dana Usaha Kelurahan) guna merangsang secara aktif keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan yang dalam pemanfaatannya harus memperhatikan potensi sumber daya alam kelurahan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) menuntut untuk menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam setiap tahapan kegiatan. Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) juga memberikan pendamping kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kapasitas, memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, membantu menggali potensi desa/kelurahan dan menjaga kualitas setiap tahapan kegiatan.

Seluruh proses kegiatan dalam PPK pada hakekatnya memiliki tiga dimensi yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam

- upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat Kelurahan. (Petunjuk Teknis PPK)

Visi PPD yaitu mewujudkan masyarakat Riau yang sejahtera dan mandiri sesuai dengan Visi Riau 2020. Misi dari PPD yaitu mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana usaha kelurahan, memperkuat kelembagaan masyarakat kelurahan, mendorong pelebagaan sistem pembangunan partisipatif, dan mendorong peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kelurahan.

Sasaran utama penerima Program Pemberdayaan Kelurahan adalah kelurahan yang memiliki relatif lebih banyak penduduk miskin sebagai lokasi sasaran program. Berdasarkan Petunjuk Teknis PPK Kota Pekanbaru, tujuan dilaksanakannya Program Pemberdayaan Kelurahan secara khusus adalah untuk:

1. Mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat kelurahan
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat kelurahan yang berpenghasilan rendah
3. Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat kelurahan
4. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir
5. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan dana usaha kelurahan
6. Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib
7. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kelurahan
8. Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan

Untuk mendukung tercapainya tujuan program tersebut maka dalam pelaksanaannya harus sejalan dengan prinsip-prinsip dibawah ini:

- a. Keberpihakan kepada orang miskin

Setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kegiatan, harus mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelompok orang miskin (bermanfaat lebih banyak bagi kelompok orang miskin).

- b. Transparansi
Seluruh operasional kegiatan PPD harus dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan transparansi atau keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Partisipasi
Adanya keterlibatan masyarakat secara aktif terutama kelompok miskin dalam setiap tahap kegiatan PPD, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pelestarian dan pengembangan kegiatan.

d. Desentralisasi

Pemberian kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kembali hak-haknya yang otonom untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan partisipatif.

e. Kompetisi Sehat

Setiap pengambilan keputusan penting dalam PPD dilakukan melalui musyawarah dan bersifat kompetisi secara sehat untuk menentukan prioritas kegiatan yang didanai, berdasarkan hasil kajian atau telaah terhadap berbagai alternatif pilihan untuk mendapatkan pilihan terbaik. (Pedoman Umum PPD)

Pada prinsipnya Dana Usaha Kelurahan sangat terbuka untuk membiayai segala jenis kegiatan usaha yang diusulkan oleh masyarakat (kecuali beberapa jenis kegiatan yang dilarang), terutama kegiatan yang menguntungkan dan melibatkan banyak masyarakat miskin, meningkatkan kesempatan berusaha serta memiliki potensi untuk berkembang dan berkelanjutan yang meliputi:

- a. Kegiatan ekonomi yang dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat desa/kelurahan serta mendorong pengembangan aktifitas ekonomi produktif.
- b. Kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat memperluas kesempatan berusaha dan pengembangan usaha bagi kelompok masyarakat miskin. (Pedoman Umum PPD)

Dalam implementasinya jenis kegiatan pada Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan meliputi :

1. Kegiatan regular perencanaan pembangunan desa/kelurahan melalui sektoral.
2. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan-Simpan Pinjam (UED/K-SP). (Petunjuk Teknis PPD)

Berdasarkan Petunjuk Teknis PPD kriteria masyarakat yang mendapat Dana Usaha Desa/Kelurahan yaitu:

1. Masyarakat miskin yang kekurangan modal usaha.
2. Memiliki jenis usaha yang produktif seperti perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, perkebunan, industri rumah tangga dan industri kecil, yang termasuk dalam jenis usaha kecil dan menengah.
3. Berdomisili tetap dan tercatat sebagai warga di kelurahan yang terdapat Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP).
4. Tercatat sebagai anggota UED/K-SP dan telah mempunyai simpanan wajib minimal Rp. 50.000,-
5. Dinilai layak oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun usaha.
6. Menyerahkan agunan seperti SKGR atau SKPT/Sertifikat/Akta, BPKB kendaraan bermotor.
7. Jika tidak memiliki agunan seperti diatas cukup dengan Kartu Keluarga (KK).

Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ini merupakan salah satu program pemerintah yang mengurangi dan mengentaskan kemiskinan, yaitu melalui pemberian dana pinjaman modal bagi pengusaha menengah ke bawah.

Untuk pelaksanaan kegiatan modal Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan pemerintah membentuk satu lembaga khusus yang disebut dengan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP). Pembentukan pengelola dilakukan melalui forum resmi musyawarah seluruh elemen dan peran serta kelurahan yang dipimpin oleh Lurah yang difasilitasi oleh konsultan pendamping yang selanjutnya pengelola UEK-SP harus mendapat pengesahan dari bupati/walikota.

Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan salah satu penerima Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) yang menerima bantuan Dana Usaha Kelurahan seperti kelurahan lain yang menerima Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) di Kecamatan Tampan ini. Maka melalui rapat ditingkat Kelurahan Sidomulyo Barat, LPM, wakil perempuan dan yang terkait dalam pemerintahan Kelurahan terbentuklah Lembaga Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Barat. Lembaga ini didirikan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2005.

Tabel 1.2 Laporan Perkembangan Pinjaman UEK-SP Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

| Jumlah seluruh peminfaat UEK-SP | Jumlah peminfaat yang lunas | Jumlah peminfaat yang belum lunas |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 475 peminfaat | 135 | 341 |

Sumber : UEK-SP Sidomulyo, 2014

Tujuan didirikannya Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ini adalah sebagai tindak lanjut dari kebijakan dan Program Pemerintah dalam upaya proses mempercepat tingkat pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan memberikan pinjaman modal usaha bagi usaha ekonomi masyarakat menengah kebawah, dari dan oleh masyarakat.

Bentuk riil dari program ini adalah untuk melayani masyarakat pengusaha kecil yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari Kantor Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang ada di beberapa Kelurahan di Kota Pekanbaru adalah salah satu alternatif lembaga keuangan bukan bank yang dapat memberikan perhatian kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah yang menginginkan modal bantuan usaha.

Dari pra survei yang dilakukan di lapangan yaitu di Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang berada di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di temukanlah beberapa kendala atau

fenomena sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) tersebut, yaitu:

1. Tidak adanya kesadaran nasabah/pemanafaat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengembalian pinjaman Dana Usaha Kelurahan sehingga dana yang seharusnya digulirkan kepada nasabah/pemanafaat baru tidak bisa dijalankan secara efektif.
2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga menyebabkan berbagai program telah dijalankan tidak terlalu banyak mengangkat kehidupan mereka. Bahkan terkadang program tersebut habis begitu saja tanpa memberikan hasil apa-apa di kalangan masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul “ Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”.

Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial di masa mendatang, terutama dalam Ilmu Administrasi Publik.
- b. Secara Praktis, sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP).
- c. Secara Akademis, sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama.

Konsep Teori

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks dimana kemiskinan tidak disebabkan oleh satu faktor tetapi banyak yang saling terkait. **Sharp (dalam Kuncoro, 2004 : 157)** mengidentifikasi beberapa penyebab kemiskinan, dilihat dari segi ekonomi yaitu sebagai berikut

- a. Tinjauan secara makro bahwa kemiskinan muncul akibat dari tidak selamanya pola kepemilikan sumber daya, sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitas yang rendah.
- b. Perbedaan kualitas sumber daya manusia yang tersedia, kualitas SDM yang rendah berarti produktivitasnya rendah sehingga pendapatannya rendah, rendahnya kualitas SDM disebabkan oleh rendah pendidikan, nasib yang tidak beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
- c. Kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan akses dalam mendapatkan modal.

Upaya pengentasan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama di daerah pedesaan harus dipahami sebagai upaya yang bertujuan untuk memberi ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri, dan tidak dengan menekan mereka ke pinggir atau posisi ketergantungan.

Upaya pengentasan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama di daerah pedesaan harus dipahami

sebagai upaya yang bertujuan untuk memberi ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi tumbuhnya kemampuan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri dan tidak dengan menekan mereka keposisi ketergantungan.

1. Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pengentasan kemiskinan adalah proses pemberdayaan terhadap masyarakat miskin itu sendiri. Pemberdayaan selalu mengacu kepada kelompok masyarakat yang berada pada lapisan bawah.

Menurut **Gunawan (1999 : 254-255)** Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan serta meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang pertama, penerapan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang, kedua, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan prasarana dan sarana yang baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah, ketiga, perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Siagian (2002 : 72) mengemukakan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia adalah upaya yang dilakukan untuk menggali dan membangkitkan segenap potensi yang ada dalam diri manusia itu agar dapat member manfaat bagi diri dan lingkungannya.

sesungguhnya manusia punya potensi adakalanya potensi itu bangkit dengan sendirinya adakalanya potensi itu bangkit perlu digerakkan.

Nakamura dan (Smallwood dalam Sujianto 2008:152) mengemukakan bahwa ada tiga cara yang dominan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program:

1. Perspektif yang menilai keberhasilan pelaksanaan program dari aspek kepatuhan aparat birokrat bawahan kepada birokrat atasannya, atau derajat kepatuhan birokrasi-birokrasi pada umumnya terhadap mandat/kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang.
2. Keberhasilan pelaksanaan program dari segi berfungsinya prosedur-prosedur rutin dalam pelaksanaan program dan tidak adanya konflik. Kedua perspektif ini mendefinisikan keberhasilan pelaksanaan program dari segi proses.
3. Keberhasilan pelaksanaan program dilihat dari segi pencapaian tujuan-tujuan programatis yang diharapkan dari dampak program.

Ketiga perspektif tersebut dikaji dalam penelitian ini, yaitu perspektif dari aspek kepatuhan, prosedur-prosedur rutin dan pencapaian tujuan-tujuan. Hal ini di karenakan beberapa sebab: *Pertama*, perspektif dari aspek kepatuhan sangat sesuai sekali dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. *Kedua*, perspektif berfungsinya prosedur-prosedur rutin dalam pelaksanaan program dan tidak adanya konflik, dapat dilihat karena pelaksanaan Program

Pemberdayaan Desa (PPD) melalui UEK-SP melibatkan instansi-instansi lain terutama dalam penetapan keputusan di setiap tahapan kegiatan yang dilakukan melalui musyawarah dan melibatkan masyarakat. *Ketiga*, perspektif dari segi pencapaian tujuan-tujuan programatis yang diharapkan dari dampak program sesuai dengan adanya tujuan yang diharapkan dari program tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini menilai keberhasilan UEK-SP ini mengacu pada ketiga aspek tersebut.

Metode

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena social serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Kantor UEK-SP). Adapun yang menjadi informan penelitian adalah Ketua UEK-SP Sidomulyo, Staff UEK-SP Sidomulyo, dan masyarakat pemanfaat dana UEK-SP Sidomulyo. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yakni berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Penyajian data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Agar lebih jelas mengenai Program Pemberdayaan Kelurahan melalui Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) dalam penelitian ini maka usaha yang dilakukan adalah dengan melihat Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) itu sendiri maka akan penulis uraikan secara rinci dengan indikator dari pelaksanaan program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam yang ada. Adapun indikator dari pelaksanaan program usaha ekonomi kelurahan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepatuhan

Kepatuhan yang dimaksud disini adalah suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan program yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pemanfaat dana usaha kelurahan dalam menggunakan bantuan dana usaha tersebut sesuai dengan ketentuan program.

- a. Dana usaha kelurahan digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam

Ketentuan dalam pemberian bantuan modal usaha berupa dana usaha kelurahan adalah dapat digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam. Modal usaha ini diberikan kepada masyarakat miskin yang kekurangan modal usaha. Meningkatkan kesempatan berusaha serta memiliki potensi untuk

berkembang dan berkelanjutan yang merupakan sasaran utama dari pemberian modal usah Dari hasil wawancara penulis dengan informan dan melihat sesuai kondisi lapangan yang ada terlihat bahwa pihak UEK-SP telah melakukan sesuai dengan ketentuan dari program yakni sebelum pencairan dana dilakukan terlebih dahulu mereka melakukan peninjauan melalui tim verifikasi. Tapi kalau ada penyelewengan itu diluar pengawasan kami. Karena kami mengawasi bukan 24 jam. Kepatuhan dilaksanakan tergantung dari masing-masing pemanfaat. Ada pemanfaat yang patuh dan ada juga pemanfaat yang kurang mematuhi.

- a. Jangka waktu pengembalian pinjaman dari masyarakat pemanfaat dana usaha kelurahan ke pengelola UEK-SP disesuaikan dengan siklus usaha maksimal 18 bulan.

Ketentuan yang telah ditetapkan melalui musyawarah kelurahan di kelurahan Sidomulyo Barat dalam pemanfaatan dana usaha kelurahan yakni jangka waktu angsuran maksimal 18 bulan. Ketentuan tersebut telah disepakati oleh masyarakat dan harus diperhatikan demi keberhasilan pelaksanaan program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam ini.

Dari penjelasan diatas menyatakan bahwa pemanfaat dana usaha kelurahan banyak sekali yang terlambat dari batas pembayaran. Kurangnya kepatuhan pemanfaat terhadap ketentuan program terlihat dari sebagian pemanfaat yang tidak bertanggungjawab atas angsuran pinjaman. Kurangnya kesadaran pemanfaat dana usaha kelurahan merupakan kendala utama yang

dihadapi pihak UEK-SP. Hal tersebut yang terus diusahakan pihak UEK-SP untuk menekankan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan program UEK-SP memiliki aturan dan pertanggungjawaban.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dan melihat kondisi di lapangan bahwa pelaksanaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan namun kurangnya kepatuhan.

- c. Anggota atau kelompok pemanfaat dana usaha kelurahan tidak dapat mengalihkan dana dan tanggungjawabnya kepada orang lain.

Pemanfaat dana usaha kelurahan di UEK-SP Sidomulyo adalah pemanfaat yang sifatnya individu. Pemanfaat mendapatkan modal usaha apabila kekurangan modal untuk melanjutkan usahanya. Setiap pemanfaat tentunya harus memenuhi dan patuh terhadap semua persyaratan yang telah ditentukan oleh UEK-SP salah satunya tidak dapat mengalihkan tanggungjawab kepada orang lain.

Jadi seperti yang diketahui bahwa pemanfaat dana usaha kelurahan tidak dapat mengalihkan tanggungjawab kepada orang lain. Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan tidak ada pemanfaat yang mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Dana usaha kelurahan tidak dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana/prasarana kelurahan dan kegiatan yang termasuk dalam jenis kegiatan yang dilarang.

Dana usaha kelurahan pada prinsipnya sangat terbuka untuk membiayai segala jenis kegiatan yang diusulkan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan informan tersebut terkait dengan penggunaan dana kelurahan tersebut, sebagian memang tidak dipungkiri ada yang digunakan untuk kegiatan lain dan itu berjalan kurang baik. Terlihat bahwa pihak UEK-SP telah menganjurkan kepada masyarakat agar menggunakan dana usaha kelurahan untuk pengembangan ekonomi, namun sasaran yang dicapai kurang tepat. Sebagian pemanfaat menggunakan dana bantuan tersebut untuk kegiatan lain. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kepatuhan sebagian pemanfaat dalam penggunaan bantuan modal usaha tersebut.

Dari beberapa hasil wawancara penulis dengan beberapa informan dan melihat sesuai dengan kondisi lapangan yang ada terlihat bahwa UEK-SP telah melakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan program namun pemanfaat dana usaha kelurahan belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan program yang telah dibuat.

2. Prosedur-prosedur rutin

Yaitu suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur program. Setiap pemanfaat harus tunduk dan patuh terhadap segala macam prosedur-prosedur program yang telah ditetapkan UEK-SP. Adapun indikator dalam menentukan prosedur-prosedur dalam pelaksanaan program UEK-SP ini yaitu:

- Setiap pelanggaran terhadap prinsip dan ketentuan dasar

kegiatan dana usaha kelurahan akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan program serta norma-norma hukum yang berlaku.

Sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dalam PPK melalui UEK-SP. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PPK melalui UEK-SP. Permasalahan jatuh tempo pembayaran oleh pemanfaat merupakan permasalahan yang sering dialami. Dan jika pemanfaat jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi.

Masyarakat tidak pernah memperlakukan sanksi yang diberikan, terkait dengan pelanggaran yang sering dilakukan yakni pengembalian pinjaman yang jatuh tempo. UEK-SP berharap agar dana dari pemerintah dapat digunakan sebaik-baiknya melalui pengembangan usaha. Menjadikan masyarakat yang mandiri dan dapat keluar dari belenggu kemiskinan. Namun hal tersebut kembali lagi kepada masyarakatnya, karena tidak semua pemanfaat yang memiliki kesadaran akan manfaat dari bantuan dana usaha kelurahan tersebut.

3. Pencapaian tujuan program

Adalah suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan program untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan.

a. Pemanfaat dana usaha kelurahan adalah seluruh warga kelurahan yang memenuhi persyaratan sebagai peminjam.

Bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mempercepat penanggulangan

kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat. Pemanfaat dana usaha kelurahan adalah warga yang telah memenuhi persyaratan dan dinilai layak oleh tim verifikasi.

Pengelola UEK-SP menyatakan pelaksanaan program kurang bagus karena sebagian masyarakat ada yang tidak memenuhi syarat. Tidak hanya itu setelah turun ke lapangan terbukti usaha yang mereka jalan tidak terlalu bagus.

b. Dana usaha kelurahan yang telah dikembalikan dapat digulirkan kembali kepada masyarakat kelurahan melalui rekening perguliran.

Pemanfaat dana kelurahan yang telah melunasi angsuran pinjaman dari UEK-SP maka dapat mengajukan pinjaman kembali yakni melalui mekanisme perguliran.

Dari penjelasan informan tersebut terkait mekanisme perguliran berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang dicapai juga cukup bagus. Dimana perguliran sering dilakukan walaupun tunggakan tetap ada. Namun dana untuk digulirkan kembali sampai saat ini tidak ada kendala dan dapat diatasi.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan mengenai indikator yang penulis gunakan yaitu kepatuhan, prosedur-prosedur rutin dan pencapaian tujuan serta melihat sesuai dengan kondisi di lapangan yang ada terlihat bahwa pelaksanaan program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam dalam hal kepatuhan, prosedur-prosedur rutin dan pencapaian tujuan dari program tersebut di ketahui “kurang baik”

Seperti penggunaan dana usaha kelurahan untuk kegiatan

usaha ekonomi produktif, jangka waktu pengembalian pinjaman, sanksi bagi setiap pelanggaran, prinsip dan ketentuan dasar program larangan penggunaan dana usaha kelurahan untuk kegiatan lain, keluhan pemanfaat terhadap persyaratan sebagai peminjam. Seharusnya UEK-SP dapat melaksanakan dengan baik. Akibat dari kurang tepat pelaksanaan program maka tujuan dari PPK tidak dapat tercapai.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Dalam setiap kegiatan, diharapkan apa yang menjadi tujuan dapat dicapai tanpa adanya hambatan. Namun dalam realitanya tidak dapat dihindari bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan tersebut, begitu juga dengan pelaksanaan program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program usaha ekonomi kelurahan ini yaitu:

1. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada prinsipnya sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu pada segi pendidikan maupun kehidupan sosial dimasyarakat baik maka pelaksanaan program akan berjalan dengan lancar. Apabila kualitas SDM nya

baik maka masyarakat akan mengetahui arti pentingnya pelaksanaan program ini dan sasaran yang hendak dicapai dari program tersebut. Rendahnya SDM menjadi faktor penyebab ketertinggalan masyarakat dalam pembangunan.

Dari hasil wawancara penulis yang dilakukan dengan informan memberitahukan kepada penulis bahwa faktor SDM masyarakat yang rendah menjadikan masyarakat berada pada garis kemiskinan dan ketidakberdayaan.

2. Kurangnya pengalaman

Pada dasarnya pengalaman merupakan salah satu hal terpenting dalam melakukan suatu usaha. Belajar dari pengalaman merupakan hal yang lebih bagus daripada tidak ada pengalaman sama sekali. Hal tersebut yang dialami oleh sebagian pemanfaat, dimana mereka tidak memiliki pengalaman sama sekali dan dituntut untuk melakukan usaha. Berawal dari masyarakatnya, karena di awal peminjaman mereka cenderung menyatakan telah memiliki usaha. Namun, setelah ditinjau usaha mereka tidak jalan dan dana tersebut habis digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok.

Pihak UEK-SP telah mengerti keadaan masyarakat di kelurahan ini. Daerah lokasi yang sangat sulit dijadikan sebagai tempat usaha tentunya menjadi bahan pertimbangan besar bagi pemanfaat apalagi ditambah dengan kurangnya pengalaman. Terbukti dengan usaha mereka yang pada akhirnya berhenti.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini dapat kita lihat dalam pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pemanfaat

seperti penggunaan dana usaha kelurahan yang tidak sesuai ketentuan, pembayaran angsuran pinjaman yang sering terlambat. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan sekali mengingat dana bantuan dari pemerintah mempunyai nilai manfaat yang lebih untuk kemajuan perekonomian masyarakat.

Kesadaran dalam diri sangat diperlukan sekali bagi pemanfaat dana usaha kelurahan. Pemerintah melakukan suatu kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi tentunya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat menjadi mandiri dan terlepas dari belenggu kemiskinan. Apabila kesadaran tidak dimiliki tentu saja sangat sia-sia bantuan yang sudah diberikan pemerintah karena tidak mampu mengangkat kehidupan mereka sendiri.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengolahan data dan analisa data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan peneliti mengenai Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Kesimpulannya pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan melihat dari sisi kepatuhan, prosedur-prosedur rutin, dan pencapaian tujuan program “Kurang Baik” karena tidak tercapainya semua indikator yang telah ditentukan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia pengelola dan pemanfaat dimana kurangnya kerjasama dan pengalaman diantara semua pelaku UED-SP mengakibatkan dana menjadi tidak tepat sasaran, Karena selama ini masalah yang cenderung timbul pada UED-SP ini adalah berasal dari pemanfaat itu sendiri, selain itu mereka merasa sanksi tidak berjalan walaupun mereka menunggak, sehingga mereka melalaikan kewajibannya.

- 2) Kurangnya Pengalaman

Dilihat dari lokasi yang sangat sulit dijadikan sebagai tempat usaha tentunya menjadi pertimbangan bagi pemanfaat dan ditambah lagi kurangnya pengalaman. Terbukti dengan ada salah satu diantara mereka yang pada akhirnya usahanya berhenti.

- 3) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini dapat kita lihat dalam pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pemanfaat seperti penggunaan dana usaha kelurahan yang tidak sesuai ketentuan, pembayaran angsuran pinjaman yang sering terlambat. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan sekali mengingat dana bantuan dari pemerintah mempunyai nilai manfaat yang lebih untuk kemajuan perekonomian masyarakat.

B. Saran

Saran untuk UEK-SP Sidomulyo adalah sebagai berikut :

1. Proses pengelolaan diharapkan dilakukan sesuai dengan yang telah diatur, dan diharapkan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap dana yang diberikan sehingga tujuan program memberdayakan bisa tercapai.
2. Diharapkan para pemanfaat dapat berkembang usahanya dan bagi pemanfaat yang membuka usaha baru harus sesuai dengan kemampuannya jika perlu pemanfaat mengikuti pelatihan-pelatihan wirausaha sebelum membuka usaha.
3. Diharapkan pemerintah mempertegas sanksi bagi penunggak sehingga penunggak merasa takut jika melakukan penunggakan. Dan agar pengelola dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat agar masyarakat lebih bertanggungjawab dan memiliki kesadaran dalam penggunaan dan pengembalian dana.

Daftar Pustaka

- Siagian, Sondang P. 2002. Administrasi Pembangunan. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah “Reformasi Perencanaan Strategi dan Peluang”. Penerbit Erlangga : Jakarta.
- Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik “Konsep, teori dan praktik”. Alaf Riau: Pekanbaru.
- Sumodiningrat, Gunawan, dkk. 1989. Kemiskinan “Teori, fakta dan Kebijakan. IMPAC : Jakarta.
- Peraturan Gubernur Riau Tahun 2009 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Sidomulyo 2005.